

PERAN KELOMPOK MASYARAKAT DALAM PENGUATAN INOVASI SOSIAL DI DESA KARANGREJO KECAMATAN BOROBUKUR KABUPATEN MAGELANG

THE ROLE OF CIVIL SOCIETY IN STRENGTHENING SOCIAL INNOVATION IN THE VILLAGE KARANGREJO DISTRICT D BOROBUKUR MAGELANG

Arif Sofianto

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah
Jl. Imam Bonjol 190 Semarang Telp. 024 3540025
e-mail: areef_sofiant@yahoo.com

Dikirim: 27 Februari 2013; direvisi: 17 Maret 2013; disetujui: 18 Maret 2013

Abstrak

Desa Karangrejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang merupakan wilayah yang akan dikembangkan menjadi Desa Wisata, didukung banyak potensi, baik bidang pertanian kerajinan, kuliner maupun perdagangan, namun belum berkembang dengan baik. Hal tersebut disebabkan oleh belum sinerginya pengelolaan wisata antar sektor dan antar pelaku. Solusi dari persoalan tersebut adalah dibentuknya kelompok yang mampu menjadi sarana bersama. Namun persoalannya adalah kelompok yang ada sekarang, yaitu Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) belum berfungsi sebagaimana mestinya. Penelitian ini memfokuskan pada analisis kebutuhan penguatan dan peningkatan peran Pokdarwis di Desa Karangrejo untuk meningkatkan pengelolaan wisata mereka. Solusi yang dapat dianjurkan adalah: 1). Perlunya kepala desa meyakinkan kebulatan tekad, membicarakan bersama segenap masyarakat dalam rembug desa untuk memantapkan diri, menyamakan persepsi bahwa Pokdarwis harus diaktifkan, dan diakui sebagai aktor utama yang berisi banyak orang (aktor kolektif). 2). Penegasan struktur dengan tugas dan fungsi yang jelas, serta menambahkan beberapa struktur penting lainnya dalam kepariwisataan, seperti promosi, kerjasama dan perencanaan program, 3). Menyamakan persepsi mengenai prosedur-prosedur utama pariwisata desa, sehingga semua pihak mendapatkan manfaat, dan 4). Perlunya melakukan penataan objek dan produk wisata sesuai dengan standar kualitas yang diharapkan. Perlu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang kompeten untuk meningkatkan kualitas produk wisata, serta sarana pendukung lainnya.

Kata kunci: Kelompok Masyarakat, Inovasi, Desa Wisata, Karangrejo.

Abstract

Karangrejo Village, District Borobudur, Magelang Regency is an area that will be developed into a Tourist Village, supported by a lot of potential, good agricultural crafts, culinary and trade, but not yet well developed. But the problem is the current group, the Tourism Awareness Group (Pokdarwis) is not working properly. This study focuses on the analysis of needs strengthening and increasing role of Pokdarwis in the Karangrejo village to improve the management of their tour. Solutions that can be recommended are: 1). The need for determination to convince the village chief, talk with all the people in the village consultation to establish itself, the same perception that Pokdarwis are enabled, and is recognized as a major actor that contains a lot of people (collective actors). 2). Confirmation of the structure with clear tasks and functions, as well as added some other important structures in tourism, such as promotion, cooperation and planning, 3). Equating perception about the main procedures of village tourism, so that all parties benefit, and 4). The need to undertake the arrangement of objects and tourism product in accordance with the quality standards expected

Keywords: Community groups, Innovation, Tourism Village, Karangrejo

PENDAHULUAN

Selama ini, persoalan kemiskinan dan keterbelakangan identik dengan kehidupan masyarakat pedesaan. Persoalan tersebut lebih disebabkan karena struktur perekonomian yang kurang memberikan ruang bagi masyarakat pedesaan untuk berpartisipasi lebih dalam terhadap pelaksanaan pembangunan (Daryanto

& Nuryartono, dalam Arif Satria, dkk. 2011;64). Menurut Daldjoeni dan Suyitno (2004;126) ada semacam dilema di desa, yaitu adanya kemiskinan dan pengetahuan yang rendah menyebabkan pemanfaatan yang kelewat batas atas sumberdaya alam, akan tetapi di sisi lain banyak sumberdaya yang ternyata belum dimanfaatkan secara optimal seperti sinar

matahari, air, angin, tanaman, ikan, ternak dan tenaga manusia.

Salah satu wilayah yang cukup potensial namun masih cukup terpuruk adalah Desa Karangrejo, Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, dimana menyimpan banyak potensi pertanian, peternakan maupun pariwisata yang dapat dikembangkan secara bersamaan, namun belum terbentuk kelembagaan yang mampu menangani potensi tersebut dengan baik. Selain itu terdapat kendala permodalan, sarana dan prasarana serta desain dan kemasan produk desa. Potensi yang cukup menarik adalah terdapatnya beragam sumberdaya alam maupun sosial, yaitu pertanian secara luas, seni tradisional, objek wisata alam dan budaya serta lingkungan yang sangat memberikan nilai jual tinggi, serta terletak di daerah klaster wisata terbesar di Jawa Tengah, yaitu Borobudur. Namun demikian, potensi belum dapat dikembangkan dengan lebih optimal untuk mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Kondisi tersebut disebabkan oleh lemahnya kapasitas SDM, kelompok masyarakat maupun pemerintah desa. Kapasitas masyarakat pelaku usaha sangat kurang karena terbatasnya transfer teknologi, transfer pengetahuan dan dukungan sumberdaya dari berbagai pihak. Warga desa masih menjalankan usaha dengan konsep “seperti biasanya”, mereka melakukan usaha seperti yang dilakukan orang sebelumnya. Dengan demikian diperlukan upaya lebih untuk membantu masyarakat meningkatkan kapasitasnya melalui keterlibatan lembaga pengetahuan, lembaga litbang dan lembaga lainnya dalam upaya transfer teknologi, transfer pengetahuan dan membangun jejaring.

Pada sisi pariwisata, meskipun hanya berjarak 2 Km dari Candi Borobudur, namun Desa Karangrejo belum mampu menerima manfaat tersebut, karena ternyata potensi besar Candi Borobudur justru dinikmati oleh daerah lain, terutama Yogyakarta. Sesuai dengan hasil survei UNESCO (Bappeda Kab. Magelang, 2012) terhadap pengunjung Candi Borobudur (wisatawan asing), beberapa hal menunjukkan masyarakat sekitar tidak menikmati hasil dari adanya Candi Borobudur.

Tentunya hal tersebut sangat disayangkan, karena potensi pemasukan yang besar belum dapat dimanfaatkan oleh desa-desa di sekitar Borobudur, termasuk Desa Karangrejo. Masyarakat desa masih lemah dalam

mengorganisasikan diri dan lembaga desa yang sudah ada masih belum cukup mapan.

Kapasitas kelompok masyarakat masih sangat terbatas, dari segi kuantitas, kelompok profesi hanya terdiri dari kelompok tani dan gabungan kelompok tani (Gapoktan) yang aktif. Sedangkan kelompok sosial budaya terdiri dari satu kelompok wanita bernama “Sukma” dengan aksi kegiatan di bidang sosial, kelompok pemuda, serta beberapa kelompok bidang seni, yaitu tari, gamelan, jathilan, dan sejenisnya. Permasalahannya adalah kelompok-kelompok tersebut kurang memiliki kapasitas, belum memberikan peran yang berarti dalam mendukung pembangunan desa. Dengan demikian, perlu adanya upaya memberikan perhatian yang lebih baik untuk meningkatkan kapasitas kelompok masyarakat dan fasilitasi kelompok-kelompok baru.

Dengan demikian perlu dilakukan penelitian yang memfokuskan pada pembentukan, penguatan dan peningkatan peran kelompok masyarakat di Desa Karangrejo untuk meningkatkan daya saing produk mereka. Kajian yang diperlukan adalah mengenai peran kelompok masyarakat, baik kelompok tani, pemuda, seni budaya, perempuan maupun kelompok lainnya di Karangrejo tersebut terhadap peran mereka dalam meningkatkan kualitas atau nilai jual produk desa, terutama hasil pertanian dan pariwisata melalui inovasi-inovasi baru. Bagaimana kelompok mampu merubah sikap petani secara sosial (inovasi sosial) sehingga berpengaruh pada kemajuan mereka sangat diperlukan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka rumusan masalah yang perlu dijawab dalam penelitian ini adalah **“bagaimana peran kelompok masyarakat dalam melakukan inovasi sebagai upaya optimalisasi sumberdaya desa untuk meningkatkan kesejahteraan”**.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang dilakukan untuk mengetahui keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana, berapa banyak, sejauh mana dan sebagainya (Suharsini Arikunto, 2002). Pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah kualitatif. Menurut Sugiyono (2009), metode penelitian kualitatif adalah penelitian dimana data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat

kualitatif. Menurut Bungin (2008) penelitian kualitatif melampaui berbagai tahapan berpikir kritis ilmiah yaitu seorang peneliti memulai berpikir secara induktif, menangkap berbagai fakta dan fenomena-fenomena sosial melalui pengamatan lapangan, kemudian menganalisis dan melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diamati.

Lokasi

Sesuai dengan judul penelitian, maka lokasi penelitian ini adalah di Desa Karangrejo, Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang. Desa Karangrejo dipilih karena merupakan wilayah pertanian yang cukup potensial didukung dengan sumberdaya alam, dan sumberdaya sosial seperti seni dan budaya, serta potensi pariwisata yang sangat besar dan dapat dikombinasikan dengan pertanian dan kerajinan. Namun semua potensi tersebut belum dapat dikembangkan secara bersamaan sehingga mendatangkan hasil yang optimal.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau populasi dalam penelitian ini ialah seluruh anggota kelompok masyarakat di Desa Karangrejo. Kelompok yang dimaksud dalam hal ini adalah Pokdarwis. Untuk keperluan pengambilan data, maka akan diambil beberapa pihak yang memiliki objektivitas, kepentingan, dan pengetahuan terhadap permasalahan penelitian.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari wawancara dari para informan yang berisi tentang pendapat dan pemahaman mengenai peran kelompok masyarakat dalam memberikan perubahan bagi desanya. Data sekunder berasal dari dokumen terkait objek penelitian dari berbagai sumber.

Instrumen Penelitian dan Pengambilan Data

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini ialah panduan wawancara atau daftar pertanyaan terbuka. Informan tertentu diwawancarai secara mendalam dan sebagian yang lain diminta mengisi daftar pertanyaan terbuka yang disediakan. Metode seperti ini dilakukan agar data yang didapat benar-benar *valid* dan *reliabel*.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis yang dikembangkan oleh Spradley

seperti yang dikutip Sugiyono (2009). Analisis model Spradley merupakan kesatuan proses linear yang dimulai dari analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial dan analisis tema budaya.

Analisis Domain menurut Sugiyono (2009) merupakan tahap awal dari penelitian, yaitu dengan memperoleh gambaran umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti atau objek penelitian. Analisis Taksonomi menurut Sugiyono (2009) adalah analisis terhadap keseluruhan data yang terkumpul berdasarkan domain yang telah ditetapkan. Domain yang telah ditetapkan dirinci lebih mendalam untuk mengetahui struktur internalnya yang dilakukan dengan observasi terfokus. Analisis Komponensial ialah mencari ciri spesifik pada setiap struktur internal dengan mengkontraskan antarelemen sebagaimana disampaikan Sugiyono (2009). Jadi pada intinya analisis taksonomi adalah mencari perbedaan atau mengkontraskan antarelemen, sehingga diketahui ciri-ciri spesifik masing-masing yang membedakan dengan lainnya. Analisis Tema Budaya menurut Sanapiah Faisal sebagaimana dikutip Sugiyono (2009) adalah upaya mencari benang merah yang mengintegrasikan lintas domain yang ada. Dengan ditemukan benang merah tersebut, maka selanjutnya akan dapat disusun konstruksi bangunan situasi sosial/objek penelitian secara komprehensif.

Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan mulai bulan Juli – September 2012 di Desa Karangrejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Gambaran Umum

Desa Karangrejo termasuk dalam wilayah administratif Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Desa Karangrejo memiliki luas 174 Ha terdiri dari 98 Ha sawah dan ladang, 72 Ha permukiman dan sisanya fasilitas umum. Desa bertopografi dataran rendah yang sesuai untuk pertanian. Desa Karangrejo juga hanya berjarak sekitar 5 Km dari pusat pemerintahan Kabupaten Magelang, dan 2 Km dari pusat pemerintahan Kecamatan Borobudur, serta hanya sekitar 2 Km dari Candi Borobudur. Namun demikian tidak banyak manfaat yang diperoleh masyarakat dari keberadaan candi dan pengunjung di Borobudur.

Mayoritas warga Karangrejo bekerja di sektor swasta dalam hal ini pedagang, petani dan buruh tani serta sektor jasa, terutama di bidang pariwisata dan kesenian. Kebanyakan mereka yang bekerja di sektor wisata menggantungkan hidupnya di sekitar kawasan wisata Candi Borobudur, baik sebagai penjual asongan, pemandu wisata, fotografer, angkutan wisata, maupun pekerja serabutan atau sebagai tenaga kebersihan, penjaga hotel dan tenaga keamanan, serta sektor informal lainnya.

Kehidupan masyarakat secara umum banyak bergantung pada kondisi lahan di desa, serta keberadaan Candi Borobudur. Namun demikian, masyarakat desa Karangrejo belum dapat menikmati keberadaan wisatawan di Candi Borobudur. Sebagaimana disampaikan di atas, bahwa meskipun dekat dengan Borobudur, namun tidak begitu banyak wisatawan yang berkunjung ke desa, baik sekedar jalan-jalan, membeli produk atau menginap.

Akan tetapi ada sedikit perubahan kondisi ketika pada pertengahan tahun 2000-an, seorang fotografer menemukan bahwa pemandangan di salahsatu lokasi di desa tersebut cukup menakjubkan dan layak dijual sebagai tujuan wisata. Di puncak salahsatu bukit bernama Punthuk Setumbu, wisatawan dapat melihat pemandangan Candi Borobudur dan bukit serta lembah di sekitarnya yang cukup menarik terutama pada saat terbit matahari (*sunrise*) dan pagi hari, serta di sore hari. Potensi yang selama berpuluh tahun tidak disadari warga tersebut, kemudian menjadi andalan utama wisata di Desa Karangrejo.

Semenjak Punthuk Setumbu diketahui potensinya, semakin lama banyak wisatawan, terutama wisatawan asing berkunjung ke desa tersebut. Situasi ini memberikan harapan bagi warga desa untuk meningkatkan perekonomian mereka. Sehingga warga dan pemerintah desa setempat mulai memikirkan penataan kunjungan wisata di Punthuk Setumbu, baik secara infrastruktur maupun kelembagaan.

Keberadaan Punthuk Setumbu menjadi harapan akan adanya wisatawan yang berkunjung ke desa. Kunjungan wisatawan tersebut tentunya diharapkan memberikan peluang bagi masyarakat untuk menerima manfaat keberadaan wisatawan ke Desa Karangrejo. Para pengrajin, pelaku usaha kuliner, jasa wisata dan penginapan yang selama ini menjajakan barang dan jasanya di sekitar Candi Borobudur berharap bahwa mereka dapat menjual barang dan jasanya di

desa mereka sendiri. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Kepala Desa Karangrejo, Nuranis Musodik “kita berharap bahwa warga kita yang berjualan asongan di Borobudur nanti dapat beralih menjual barangnya di rumah saja”.

2. Pengelolaan Punthuk Setumbu

Pemerintah desa dan masyarakat pernah mencoba melakukan pengaturan dalam pengelolaan Punthuk Setumbu dengan melibatkan masyarakat yang lebih luas, namun pengelolaan di lapangan berbeda. Pengelolaan saat ini hanya dilakukan oleh warga di sekitar Punthuk Setumbu (Dusun Kurahan) dan belum melibatkan warga dusun lainnya, termasuk dampak kunjungan wisata bagi perekonomian desa secara luas.

Ada semacam jarak antara warga dusun Kurahan dan dusun lain, mereka merasa Punthuk Setumbu milik mereka. Sehingga warga dusun lain juga merasa sungkan atau tidak berani untuk turut campur dalam pengelolaan Punthuk Setumbu. Lembaga pengelola wisata (Pokdarwis) kurang memberikan pengaruh pada keterlibatan masyarakat yang lebih luas. Masyarakat dusun lain belum merasakan manfaat dari keberadaan Punthuk Setumbu tersebut. Bahkan kini terjadi persoalan mengenai transparansi pengelolaan, sehingga terjadi semacam konflik internal antar warga dusun Kurahan. Seperti yang disampaikan oleh Ahmad Nawawi selaku wakil ketua Pokdarwis sebagai berikut;

“Saat ini pengelolaan Punthuk Setumbu dilakukan oleh warga Dusun Kurahan, sedangkan warga dusun lain tidak ada yang terlibat karena sungkan. Apalagi kini mulai timbul persoalan diantara warga dusun Kurahan tersebut, karena adanya persoalan transparansi keuangan. Sehingga kita sebagai warga dusun lain merasa sungkan. Konflik tersebut terjadi diantara para warga di dusun Kurahan karena tidak adanya kepercayaan diantara para pengelola Punthuk Setumbu dan warga lainnya, terutama masalah pendapatan dari retribusi dan sumbangannya untuk dusun”.

Persoalan tersebut juga diiringi dengan tidak berfungsinya organisasi atau kelompok masyarakat secara nyata, karena belum adanya komitmen dan kemauan yang kuat dari warga.

Pernah dibentuk koperasi wisata dan adanya iuran di Pokdarwis namun terhenti dengan sendirinya karena masyarakat kurang yakin dengan perkembangan yang ada, terutama masih minimnya kunjungan wisatawan.

Hal senada juga diungkapkan oleh Walidin, selaku koordinator pengelola Punthuk Setumbu. Pengelolaan Punthuk Setumbu dan objek lain pernah dibentuk koperasi wisata, namun sekarang tidak aktif lagi, karena tidak ada yang mengurus, penjaga Punthuk Setumbu juga adalah pemuda yang relatif memiliki banyak kesempatan waktu dan tenaga. Menurutnya memang pengelolaan Punthuk Setumbu oleh pemuda Kurahan saat ini menimbulkan konflik antar warga, dimana warga kurang percaya dengan pengelolaan keuangan karena tidak adanya transparansi, seperti diungkapkan Walidin sebagai berikut:

“Pengelolaan oleh pemuda di sini pernah mendapatkan kritikan dari warga lain karena persoalan transparansi pengelolaan uang, terutama hasil dari retribusi serta sumbangannya kepada dusun, maka kita mencoba untuk membenahi laporan keuangan kita catat jumlah rupiahnya setiap hari dan semua orang bisa membacanya”

Pihaknya telah melakukan perubahan berupa transparansi laporan keuangan, serta melibatkan masing-masing RT sebagai pengelola. Pengelolaan saat ini dibuat lebih transparan dengan laporan keuangan yang tercatat di buku, sehingga bisa diketahui semua warga. Sebagian dari dana disumbangkan kepada kas Dusun dan RT masing-masing sebagai dan pembangunan lingkungan. Dalam hal keterlibatan pengelolaan, masing-masing RT mengirimkan 2 orang setiap minggu bergilir sebagai petugas penjaga Punthuk Setumbu. Menurut Walidin, konflik tersebut sedikit demi sedikit terselesaikan melalui forum rembuk warga dusun Kurahan, sehingga kedepan dapat dilakukan pengelolaan yang lebih baik.

Saat ini pengelola Punthuk Setumbu ditetapkan berdasarkan kuota, yaitu sebanyak 11 orang, yang terdiri dari 10 orang perwakilan setiap RT dan 1 orang koordinator tetap. Di Dusun Kurahan ada 5 RT, dan masing-masing RT mengirimkan 2 orang perwakilan sebagai pengelola yang akan diganti atau digilir dengan warga lainnya setiap seminggu sekali. Setiap petugas yang berjalan di Punthuk Setumbu selama 1 minggu mendapatkan upah sebesar

Rp. 75.000,-, kemudian sebagian pendapatan dimasukkan ke dalam kas dusun dan masing-masing RT, serta sebagian lagi untuk pengembangan dan dana sosial.

Meskipun belum menghasilkan pendapatan yang besar, namun ada harapan objek tersebut akan terus berkembang, mengingat rata-rata perhari ketika masa sepi, tidak kurang dari 25 wisatawan berkunjung. Jumlah tersebut tentu akan meningkat tajam ketika masa liburan. Dengan tarif retribusi sebesar Rp. 15.000,- per orang maka penghasilan yang diperoleh cukup besar untuk ukuran wisata tersebut. Saat ini tarif hanya berlaku ketika pagi hari, antara pukul 04.00 – 08.00 Wib yaitu ketika terjadi *sunrise*, di luar waktu tersebut, pengunjung bisa memasuki Punthuk Setumbu secara cuma-cuma.

Menurut Walidin, secara langsung warga sekitar sudah merasakan manfaat keberadaan Punthuk setumbu, terutama akses jalan yang semakin bagus. Hanya secara fisik kendala yang ada di Punthuk Setumbu saat ini adalah lahan parkir terutama saat banyak pengunjung. Warga bersedia tempatnya menjadi lahan parkir asal difasilitasi infrastrukturnya.

Kendala saat ini yang dihadapi Pokdarwis adalah persoalan dana untuk pengembangan wisata dan waktu dalam keterlibatan masyarakat, karena mereka menjalankan profesi yang cukup menyita waktu, seperti pengrajin, pedagang dan jasa lainnya. Maka diperlukan penataan kelembagaan Pokdarwis lebih lanjut sehingga dapat melibatkan unsur masyarakat yang lebih luas tanpa mengganggu aktifitas nafkah mereka, justru kegiatan Pokdarwis menjadi salahsatu kegiatan utama warga dalam mencari nafkah mereka.

Pembahasan

1. Persoalan - persoalan

Kepala Desa Karangrejo, Nuranis Musodiq memahami betul kendala-kendala tersebut di atas, sehingga memerlukan perbaikan dan pembenahan di berbagai segi. Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka persoalan yang terjadi pada desa Karangrejo untuk berkembang menjadi desa wisata dapat diklasifikasikan kedalam berbagai aspek.

Dari aspek kebijakan, adalah belum adanya payung hukum yang kuat bagi pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan pengelolaan wisata yang melibatkan lebih banyak orang dan sektor yang lebih luas

dan manfaat yang lebih luas, karena saat ini belum ada persetujuan atas Perdes yang mereka ajukan ke Bupati.

Masalah dari aspek kelembagaan adalah bahwa Pokdarwis belum berjalan sebagaimana organisasi pada umumnya yang seharusnya mengkoordinir kegiatan wisata desa. Masih belum ada aktifitas nyata dari Pokdarwis, sehingga pengelolaan wisata masih sangat terbatas dan hanya melibatkan segelintir orang dengan ego-nya masing-masing.

Masalah manajerial adalah manajemen yang masih sangat tradisional dan terfragmentasi, tidak terintegrasi dan antar pelaku usaha seperti pengrajin, kuliner, jasa wisata dan kesenian belum ada sinergisitas dan kesamaan sikap dan langkah dalam mengembangkan wisata. Belum ada lembaga yang memajemen wisata desa secara sinergis.

Persoalan kapasitas adalah masih kurangnya kapasitas masyarakat dan lembaga-embaga yang ada dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pengelolaan wisata yang baik dan berdaya saing. Lemahnya transfer pengetahuan dan penguasaan teknologi serta pengelolaan wisata membuat potensi-potensi wisata yang ada tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Penguasaan bahasa asing yang kurang membuat masyarakat kurang mampu berinteraksi dengan wisatawan untuk menawarkan objek dan produk wisata desa. Selain itu, kemampuan melayani tamu atau wisatawan sangat kurang, sehingga jika ada yang berkunjung belum begitu tertarik untuk tinggal di desa.

Persoalan sosial adalah adanya ego antar warga di Punthuk Setumbu terhadap warga lainnya sehingga tidak terjadi kerjasama dan sinergi pengelolaan wisata. Di sisi lain juga terdapat perasaan tidak percaya diantara warga karena kurangnya transparansi pengelolaan. Adanya jarak diantara warga terutama dusun Kurahan dan warga dusun lainnya. Rendahnya kohesi sosial, dimana masing-masing sibuk dengan urusan usahanya sendiri tanpa memperhatikan potensi usaha yang saling terkait dan bekerjasama. Masyarakat kurang memahami bahwa dengan melakukan kerja bersama mereka akan mendapat manfaat bersama.

Di sisi lain, dapat dikatakan bahwa kendala sosial pariwisata adalah belum siapnya masyarakat dalam menghadapi kunjungan wisata. Sebagaimana disampaikan Kepala Desa Karangrejo, bahwa saat ini objek-objek wisata

berupa kuliner, kerajinan atau kesenian belum siap sedia, dengan kemasan yang belum siap jual, sehingga ditakutkan ketika wisatawan berkunjung, kurang memberikan sambutan yang baik atau tidak sesuai harapan, dan yang ditakutkan bahkan mengecewakan pengunjung. Sehingga diperlukan perbaikan internal dulu sebelum masyarakat menyiapkan diri sebagai desa wisata. Masyarakat dengan beragam profesi mereka harus disiapkan terlebih dahulu sebagai objek kunjungan wisatawan. Maka dengan demikian diperlukan kesiapan internal warga desa untuk menghasilkan produk dan suasana yang kondusif bagi wisatawan.

Pengelolaan Punthuk Setumbu kedepan memerlukan perbaikan dan penataan yang serius serta keterkaitan dengan berbagai unsur wisata lain di desa agar bisa berjalan dengan sinergis. Selama ini wisatawan yang berkunjung ke Punthuk Setumbu tidak mengunjungi objek lain atau berbelanja dan menginap di desa Karangrejo, mereka sekedar melihat Punthuk Setumbu dan langsung pergi. Punthuk Setumbu juga perlu memberikan manfaat bagi dusun lainnya, sehingga diperlukan penataan wisata yang menyeluruh di desa, melalui penataan kewenangan dan kelompok penyelenggara wisata desa.

2. Solusi Pemerintah Desa

Pemerintah desa sudah mengajukan draft Peraturan Desa mengenai pengelolaan wisata dan retribusi wisata desa kepada Bupati, dan saat ini sedang menunggu persetujuan Bupati untuk pengesahan Perdes tersebut. Kebijakan ini sebagai solusi terhadap pengelolaan wisata agar memberikan manfaat yang luas terhadap semua unsur masyarakat desa.

Penataan untuk kesiapan masyarakat desa dalam menyambut wisatawan melalui produk mereka baik kerajinan, kuliner, jasa pemandu, *homestay*, maupun sarana dan objek wisata lainnya. Meningkatkan kapasitas objek wisata dan pelaku wisata desa secara internal sehingga siap untuk menjadikan desa Karangrejo sebagai desa wisata yang dikunjungi banyak wisatawan.

Memperkuat kelembagaan wisata yang melibatkan masyarakat desa secara luas, yaitu melakukan perombakan terhadap Pokdarwis sebagai pengelola wisata desa berbasis pemberdayaan masyarakat. Pokdarwis akan diperluas dan dinamika ditingkatkan dengan penataan struktur baru yang melibatkan masyarakat lebih luas sehingga siap menjadi lembaga pengelola wisata. Sebagai lembaga

pendukung wisata, maka perlu didirikan BUMDes yang bergerak memfasilitasi kebutuhan pelaku usaha wisata, serta koperasi sebagai lembaga penunjang kegiatan usaha desa berbasis pemberdayaan masyarakat.

Penataan sarana dan prasarana pendukung wisata sehingga siap menyambut kedatangan tamu dan memenuhi kebutuhan penunjang wisata desa. Saat ini pemerintah desa dan masyarakat sedang mengupayakan dukungan dana dari berbagai pihak, selain meningkatkan keswadayaan masyarakat secara mandiri.

Mendirikan *Tourism Information Center* (TIC) sebagai pusat pengelolaan wisata desa menjadi agenda penting lainnya. TIC ditempatkan sebagai pos pusat dimana wisatawan singgah sebelum menuju objek wisata di Punthuk Setumbu yang dilanjutkan ke dusun-dusun. Akan tetapi kendala saat ini adalah bahwa TIC masih memerlukan banyak sekali biaya untuk penyelesaiannya yang sampai saat ini baru setengahnya. Masih dibutuhkan berbagai penyelesaian dan fasilitas lainnya di TIC sehingga memerlukan banyak sumberdaya. Untuk itu, pemerintah desa dan segenap unsur masyarakat terus mengupayakan terpenuhinya sumberdaya tersebut.

Berbagai macam solusi di atas merupakan upaya meningkatkan nilai tambah dari objek wisata dan pengelolaannya. Upaya menciptakan nilai tambah merupakan proses mencari cara, bentuk, produk atau proses baru yang lebih baik dari yang ada sebelumnya. Sebagaimana penjelasan yang disampaikan oleh Dagun (2006:395) bahwa inovasi dapat diartikan menjadi 3 (tiga) makna utama, yaitu *pertama*, sebagai penemuan baru yang berbeda dari apa yang sudah ada atau dikenal sebelumnya baik dalam bentuk gagasan, metode atau alat. *Kedua*, inovasi juga bisa dimaknai sebagai pembaharuan dari yang lama menyangkut pengembangan atau peningkatan suatu produk baru atau yang telah diperbaharui. *Ketiga*, inovasi juga bisa dimaknai sebagai unsur kebudayaan yang merupakan hasil pembaharuan. Seperti yang disampaikan Porter (Bantacut, dalam Arif Satria, dkk, 2011:252) bahwa inovasi merupakan dasar dari perbaikan produktivitas dan unsur pembentuk daya saing.

Dengan demikian, upaya pengembangan wisata desa Karangrejo tidak lepas dari adanya inovasi-inovasi, terutama dalam hal tata kelola wisata, manajemen dan kapasitas pengelola. Secara alamiah, desa Karangrejo telah memiliki potensi sumberdaya alam fisik, sosial dan

ekonomi yang memadai, dan hanya dibutuhkan kekuatan inovasi untuk memberikan nilai tambah pada potensi-potensi tersebut. Inovasi dalam pengelolaan wisata yang diperlukan lebih mengarah pada peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pengelolaan wisata desa.

Dengan demikian, berbicara mengenai peningkatan pariwisata, maka berbicara mengenai inovasi yang diperlukan. Sebagaimana diungkapkan di atas, inovasi tidak lepas dari kapasitas inovasi, yang dalam hal ini membicarakan mengenai para aktor dan kapasitasnya. Kapasitas aktor dalam hal ini menjadi penentu kapasitas inovasi dalam sebuah masyarakat. Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, maka aktor-aktor masyarakat sangat menentukan arah inovasinya.

3. Kelompok Masyarakat Sebagai Aktor

Kelompok masyarakat merupakan aktor komunal yang sangat dibutuhkan, karena dapat melakukan perencanaan, proses, kontrol, dan evaluasi dengan kapasitas dan legitimasi yang cukup tinggi. Dalam hal ini, aktor merupakan seluruh komponen warga Desa Karangrejo, yaitu konsep pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata.

Aktor, struktur dan prosedur merupakan paket perbaikan dalam meningkatkan inovasi pengelolaan sumberdaya desa, yang terdiri dari sistem fisik, sistem sosial dan sistem ekonomi. Pengalaman yang ada di Desa Karangrejo menunjukkan bahwa pengelolaan dengan aktor terbatas, tata kelola yang seadanya dan kewenangan yang tidak seimbang menyebabkan potensi pariwisata tidak dapat dirasakan secara optimal oleh segenap masyarakat.

Dengan demikian, satu paket inovasi dalam pengembangan wisata desa merupakan upaya yang terbagi menjadi 3 langkah penting, yaitu; 1). Menggalang aktor yang memiliki komitmen, 2). Membangun struktur dengan kewenangan yang jelas, dan 3). Menetapkan prosedur yang disepakati bersama. Dengan demikian, maka inovasi dalam pengelolaan sumberdaya desa dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu dalam sebuah sinergi. Sistem fisik, sosial dan ekonomi menjadi objek inovasi yang perlu disinergikan sehingga menghasilkan manfaat yang optimal.

Berdasarkan gambaran di atas maka dapat disimpulkan bahwa kelompok masyarakat, dalam hal ini Pokdarwis merupakan aktor kolektif yang perannya sangat dibutuhkan dalam

pengembangan wisata desa. Akan tetapi untuk menjadikan Pokdarwis berdaya, dibutuhkan kewenangan yang diarahkan oleh kepala desa. Artinya, peran sentral kepala desa sangat dibutuhkan, tentunya dengan dukungan tokoh lainnya.

Kelompok berfungsi membangun interaksi, solidaritas serta kerjasama untuk menimbulkan perubahan-perubahan baru, atau inovasi dalam pengelolaan wisata. Hal tersebut sejalan dengan konsep Porter mengenai faktor-faktor kekuatan daya saing, yang salahsatunya adalah institusi. Kelompok merupakan salahsatu bentuk institusionalisasi ide, gagasan dan tindakan yang muncul dari keinginan pelaku sendiri. Institusi membentuk atmosfer individu, pemerintah dan pelaku usaha untuk berinteraksi. Intitusi juga memungkinkan adanya proses penggunaan pengetahuan kolektif, meningkatkan pengembangan, kolaborasi riset antar pemerintah, akademik dan pelaku usaha. Sehingga kelompok memang sangat diperlukan sebagai sarana utama bagi masyarakat untuk mengembangkan kapasitasnya. Gambar 4.7 di bawah ini menunjukkan bagaimana peran kelompok dalam pengembangan potensi desa, dalam hal ini potensi wisata.

Beragam inovasi dalam bidang sosial akan dapat lahir ketika ada kelompok yang diakui bersama menjadi aktor utama dalam melakukan berbagai perubahan dan penataan. Hal inilah yang sangat dibutuhkan di Desa Karangrejo dalam mengembangkan wisatanya, yaitu melalui penguatan Pokdarwis sebagai pelaku utama yang melibatkan berbagai pihak. Langkah tersebut membutuhkan komitmen dan kepemimpinan yang kuat dari kepala desa.

Maka proses pembenahan haruslah diawali dari komitmen bersama yang membutuhkan dukungan ketegasan dari tokoh sentral, yaitu peran kepala desa untuk menyatukan komitmen, ide dan gagasan yang berserak di masyarakat agar menjadi kesatuan sebagai aktor kolektif. Benih-benih keinginan mengembangkan desa wisata sudah ada di berbagai penjuru desa, maka diperlukan penggerak yang cukup kuat untuk menyatukannya.

Perlunya sebuah forum bersama sebagai media penyatuan gagasan, dan tugas kepala desa beserta aparatnya adalah merancang forum tersebut. Pada lubuk hati terdalam setiap warga desa, dari beragam profesi dan kepentingan berbeda adalah adanya ketegasan bahwasannya mereka bisa mengandalkan sebuah aktor

kolektif yang diakui keabsahannya sebagai pelaku utama pembangunan wisata desa. Pokdarwis merupakan kemungkinan yang paling mendekati kenyataan sebagai aktor bersama tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, kelompok masyarakat (Pokdarwis) belum memberikan peran berarti dalam optimalisasi sumberdaya desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena baik aktor, struktur maupun prosedur belum ada kesepahaman atau kesamaan persepsi mengenai pembangunan wisata desa serta belum berfungsinya kelompok masyarakat dengan baik.

Kedua, kurangnya kejelasan struktur organisasi dengan tugas dan fungsi yang jelas. Dibutuhkan adanya kelompok yang memiliki kewenangan jelas, diakui sebagai aktor secara kolektif oleh segenap unsur, memiliki struktur dengan kewenangan dan fungsi yang jelas serta membangun prosedur dalam kerangka pengembangan wisata desa.

Ketiga, adanya ketidaksinergisan antar elemen dan sektor dalam penyelenggaraan kepariwisataan di desa. Dibutuhkan sebuah instrumen yang memiliki daya dalam mensinergikan aras individu, lembaga dan sistem dalam penyelenggaraan kepariwisataan di desa.

Keempat, kurang tertatanya objek dan produk wisata sesuai dengan standar kualitas yang diharapkan, serta kurangnya kerjasama dengan berbagai pihak yang kompeten untuk meningkatkan kualitas produk wisata, serta sarana pendukung lainnya.

Untuk melakukan hal tersebut dibutuhkan adanya kebulatan tekad, niat baik, saling percaya dan saling memahami bahwa langkah tersebut sangat dibutuhkan oleh semua orang. Kepemimpinan kepala desa yang kuat dalam melakukan penataan kelembagaan sosial dan ekonomi akan sangat menentukan keberhasilan tersebut. Selain itu, inovasi merupakan hal yang tidak boleh ditinggalkan dalam memberikan perubahan secara sosial, atau rekayasa sosial secara bertahap.

Seusai dengan simpulan di atas, bahwa belum nampak adanya peran kelompok dalam pengembangan wisata, sedangkan hal tersebut sangat diperlukan, maka dalam penelitian ini disarankan hal sebagai berikut: *Pertama*,

perlunya kepala desa meyakinkan kebulatan tekad, dalam hal ini kepala desa mampu membicarakan bersama segenap masyarakat dalam rembug desa untuk memantapkan diri, menyamakan persepsi bahwa Pokdarwis harus diaktifkan, dan diakui sebagai aktor utama yang berisi banyak orang (aktor kolektif);

Kedua, penegasan struktur dengan tugas dan fungsi yang jelas, serta menambahkan beberapa struktur penting lainnya dalam kepariwisataan, seperti promosi, kerjasama dan perencanaan program;

Ketiga, menyamakan persepsi mengenai prosedur-prosedur utama pariwisata desa, sehingga semua pihak mendapatkan manfaat. Semua pihak harus turut serta dalam membangun konsep wisata desa, paket wisata serta adanya keuntungan yang adil. Melalui rembug desa dapat dibangun kesepakatan mengenai pokok-pokok wisata desa.

Keempat, perlunya melakukan penataan objek dan produk wisata sesuai dengan standar kualitas yang diharapkan. Perlu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang kompeten untuk meningkatkan kualitas produk wisata, serta sarana pendukung lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, Suharsini, 2000, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Rineka Cipta
- Bungin, Burhan, 2008, *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta, Prenada Media Group
- Dagun, Save M., 2006, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, Jakarta, Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara (LPKN)
- Daldjoeni dan Suyitno, 2004, *Perdesaan, Lingkungan dan Pembangunan*, Bandung, PT. Alumni
- Satria, Arif, Ernan Rustiadi, Agusina M.P., 2011, *Menuju Desa 2030*, Bogor, Crespent Press, P4M IPB,
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta

Basis Data Tanpa Penulis

- Monografi Desa Karangrejo 2012, Pemerintah Desa Karangrejo, Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang
- Bappeda Kabupaten Magelang. Arah Kebijakan Pembangunan Pariwisata Di Kabupaten Magelang, 2012

